

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DINAS SOSIAL  
DALAM PENYALURAN BANTUAN BENCANA BAGI KORBAN BANJIR DI  
KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO**

Fachry Hidayat Katili  
NPP. 30.1319

*Asdaf Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo*  
*Program Studi Manajemen Dan Keselamatan Publik*  
Email: [fachrykatili@gmail.com](mailto:fachrykatili@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Marzuki, SP., M.Si

**ABSTRAK**

**Problem Statement/Background (GAP):** *This study discusses the synergy of the Regional Disaster Management Agency and the Social Service in distributing disaster aid to flood victims in Gorontalo District, Gorontalo Province. Purpose: of this study was to find out how the development of cooperative relations between the Regional Disaster Management Agency and the Social Service in managing disasters that often occur in Gorontalo Regency and to find out how the efforts made by the two government agencies in distributing aid are evenly distributed. Methods: The method that researchers use is a qualitative approach method. In data collection methods, researchers used observation techniques, interviews and documentation. Then the data analysis technique that researchers use is the approach of Miles and Huberman in Sugiyono (2016: 226), namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Results/Findings: The results of the study show that there is cooperation which includes food ingredients such as stocking food ingredients, establishing and activating public kitchens managed by each OPD for distribution evenly, clear legal regulations, limited budgets, inadequate infrastructure, inadequate human resources. lacking in terms of coping skills as well as a lack of education for members of the BPBD and Social Service Agency in carrying out disaster management. Conclusion: The following are several alternative strategies in terms of synergy that have been found, namely increasing friendly relations from both the Regional Disaster Management Agency and the Social Service so that there is no ego between agencies, providing education to disaster management officers with other relevant agencies so that disaster management and stakeholders formed are effective, making an application that can make it easier for the public to collect data on victims of disaster relief.*

**Keywords:** *Synergy, Regional Disaster Management Agency and Social Service, Distribution of Aid, Flood Victim*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini membahas tentang sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan bencana bagi korban banjir di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. **Tujuan:** penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan hubungan kerja sama antar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Gorontalo serta mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh kedua instansi pemerintah tersebut dalam penyaluran bantuan yang merata. **Metode:** Metode yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan kualitatif.

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:226) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kerja sama yang meliputi bahan pangan seperti melakukan penyetakan bahan pangan, mendirikan dan mengaktifkan dapur umum yang di kelola oleh masing masing OPD untuk penyaluran secara merata, regulasi hukum yang jelas, keterbatasan anggaran, sarana prasarana kurang memadai, sumberdaya manusia yang kurang dalam hal skill penanggulangan serta kurangnya pendidikan untuk anggota BPBD dan DINSOS dalam melakukan penanggulangan bencana. **Kesimpulan:** Berikut beberapa alternatif strategi dalam hal sinergitas yang telah ditemukan yaitu Meningkatkan hubungan silaturahmi baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial agar tidak adanya ego antar instansi, memberi pendidikan kepada petugas penanggulangan bencana dengan instansi terkait lainnya agar penanggulangan bencana dan stakeholder yang dibentuk efektif, membuat aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan pendataan korban bantuan bencana.

**Kata Kunci:** Sinergitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial, Penyaluran Bantuan, Korban Banjir

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bencana alam merupakan hal yang di anggap sangat serius di tiap negara, sebagaimana yang diketahui risiko yang diberikan sangat merugikan. Namanya risiko bencana alam tidak bisa diprediksi seberapa besar dampak kerugiannya. Tercatat banyak peristiwa bencana alam yang pernah terjadi dalam sejarah, baik yang kerugiannya besar maupun kecil. Indonesia menjadi negara yang potensi terjadi bencana alam sangatlah besar, mengingat letak geografis Indonesia. Bisa dilihat dari peta Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya dikelilingi oleh lautan dan mempunyai keadaan alam yang lain dari negara lain. Berdasarkan letak geografis serta kondisi geologis, Indonesia berada di posisi diapit oleh dua benua dan dua samudera. Indonesia juga masuk pada kawasan cincin api pasifik (*rings of fire*) yang terkenal aktif. Sehingga menjadikan Indonesia masuk sebagai negara rawan terhadap bencana baik secara alam, non alam maupun bencana sosial. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dalam media beliau mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari 35 negara di dunia yang memiliki tingkat ancaman bencana alam pada tahun 2018 hingga 2021 disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1. Kejadian Bencana**

NO	TAHUN	KEJADIAN	KET.
1.	2018	3.397	
2.	2019	3.814	
3.	2020	4.650	
4.	2021	5.402	

*Sumber: Sindonews, 2020*

Dari data di atas di tahun 2021 banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dengan data 1.794 kejadian di banding bencana alam lainnya. Hal ini menjadikan

banjir sebagai potensi ancaman yang sering terjadi di setiap tahunnya. Banjir merupakan bencana alam yang sangat merugikan baik korban jiwa, kerusakan bangunan, dan lain lain.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP)**

Namun harus diakui, walaupun sudah adanya sinergitas antar BPBD dan DINSOS terdapat permasalahan atau gap yang terjadi di lapangan. Antara lain regulasi yang tidak berjalan dengan baik antar untuk mengatur pelaksanaan berjalan dengan lancar, kerja sama dan anggaran antar lembaga.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Hakim berjudul *Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2018*. Hasil Penelitian ini menunjukkan Dinsos Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dan fungsi membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang sosial. Peran kesejahteraan sosial dalam penyaluran bantuan pendapatan bagi korban kebakaran masih dipandang lemah dan perlu perhatian khusus kepada anggota keluarga terdekat. Kelangsungan hidup dasar para korban bencana berupa makanan, pakaian, dll. Dipastikan dengan penyaluran bantuan sosial. Sejauh ini hasil yang dicapai telah berjalan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan agar dapat terealisasi dengan sempurna (Hakim, 2021). Hasil penelitian Ischa dan Sarwono dengan judul *Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam Studi Empiris pada Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro*, Hasil dari penelitian tersebut berupa pentingnya pengelolaan distribusi bantuan dalam situasi darurat membutuhkan koordinasi antar berbagai actor yang terlibat dalam mekanisme distribusi bantuan. Pendistribusian bantuan yang harus sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pelaksanaan mekanisme distribusi bantuan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan fungsi manajemen logistic, namun mekanisme distribusi juga dapat terhambat oleh dukungan logistic (Ischa dan Sarwono, 2014). Hasil penelitian Paripurno dan Prasetya dengan judul *Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir: Studi Kasus Tanggap Darurat Bencana di Kota Kendari tahun 2017* menunjukkan hasil tim TRC melakukan respon krisis bencana banjir melakukan kajian dampak bencana dan membantu penanggulangan bencana banjir di Kota Kendari. Penanggulangan darurat bencana banjir tetap dilanjutkan, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Permasalahan yang muncul yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam pembantuan pendistribusian kendala logistic dan peralatan yang kurang memadai, kurangnya informasi yang akurat tentang wilayah atau lokasi bencana banjir, dan anggaran yang terbatas (Paripurno dan Prasetya, (2021).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada judul dan lokasi penelitian.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja dalam bentuk sinergitas anataran BNPB dan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021.

## **II. METODE**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan penelitian kualitatif, peneliti akan mendapatkan fakta fakta yang ada di lapangan mengenai penyaluran bantuan bencana logistik bagi korban banjir dari BPBD dan Dinas

Sosial di Kabupaten Gorontalo, hambatan yang dialami dilapangan dan cara mengatasi hambatan tersebut.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai institusi/lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan penanggulangan bencana di daerah melaksanakan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu instansi yang melaksanakan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Gorontalo salah satunya penyaluran bantuan bencana bagi korban banjir. Dalam penyaluran bantuan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak bekerja sendirian. Terdapat banyak instansi Pemerintah yang tergabung dalam penanggulangan bencana tersebut.

#### 3.1 Sinergitas BPBD Dan Dinsos dalam Penyaluran Bantuan Bencana Bagi korban Banjir Kabupaten Gorontalo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu instansi yang melaksanakan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Gorontalo salah satunya penyaluran bantuan bencana bagi korban banjir. Dalam penyaluran bantuan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak bekerja sendirian. Terdapat banyak instansi Pemerintah yang tergabung dalam penanggulangan bencana tersebut. Salah satu instansi Pemerintah yang tergabung didalamnya adalah Dinas Sosial. Dua instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsinya masing masing.

Penyaluran bantuan bencana BPBD dan DINSOS melakukan kerja sama sehingga penyaluran kepada korban banjir dapat berjalan dengan baik. Menurut data pada tahun 2022 korban terdampak banjir sebanyak 6.692 jiwa dan 1.996 kartu keluarga. Tercatat masih banyak sekali korban yang terdampak bencana banjir, sehingga BPBD dan DINSOS harus melakukan penanggulangan lebih ekstra lagi dalam hal penyaluran bantuan bencana. Untuk melihat tingkatan atau ukuran keberhasilan sinergitas BPBD dan DINSOS dalam penyaluran bantuan bencana di Kabupaten Gorontalo maka diperlukan indikator yang dijadikan penyaluran bantuan bencana di Kabupaten Gorontalo maka diperlukan indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan dalam program tersebut. Peneliti menganalisis sinergitas BPBD dan DINSOS dalam penyaluran bantuan bencana dengan menggunakan teori sinergitas yang dikemukakan oleh Covey dalam Najiyati.

**Tabel 4.4**  
**Daftar Korban Banjir**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH		TOTAL JUMLAH JIWA
			KK	JIWA	
1	DUNGALIYO	BONGOMEME	71	228	228
2	TELAGA JAYA	BUHU	118	418	876
		HUTADAA	130	458	
3	TILANGO	LAWONU	23	67	3847
		ILOTIDEA	267	520	
		TABUMELA	208	778	
		TILOTE	335	1260	
		TUALANGO	208	701	
		TENGGELA	135	521	

4	LIMBOTO	HUNGGALUW A	240	853	853
5	BILATO	JURIA	14	36	36
		TOTOPO	114	402	402
6	BOLIYOHUT O	TOLITE	133	450	450
			<b>1.996</b>	<b>6.692</b>	<b>6.692</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

**Tabel 4.5**  
**Logistik Dinas Sosial**

no	Nama barang	Jumlah dalam satuan	Nilai dalam satuan	Saldo awal	nilai	Jumlah				Saldo akhir
						Mutasi				
						masuk	nilai	keluar	nilai	
1	Beras	KG		-		2.200	-	-	-	2.200
2	Sarden	KALENG		-		1.200	-	-	-	1.200
3	Mie instant	BKS		-		2.352	-	-	-	2.352
4	Wajan	BUAH		-			-	-	-	-
5	Kaos dewasa	LEMBAR		-			-	-	-	-
6	Daster	LEMBAR		-			-	-	-	-
7	Seragam smp pria	PASANG		-			-	-	-	-
8	Seragam smp wanita	PASANG		-			-	-	-	-
				-	-	5.752	-	-	-	5.752

*Sumber: Dinas Sosial Kab. Gorontalo*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ican Napu, SE.I selaku Kepala Seksi penggerak swadaya masyarakat ahli muda beliau mengatakan dalam pendistribusian jika pihak DINSOS tidak memiliki anggaran ataupun tidak memiliki persediaan untuk pendistribusian, maka Dinas sosial akan melakukan penyuratan ke pihak BPBD untuk meminta persediaan bantuan logistik bencana. Berdasarkan hasil wawancara di dua instansi pemerintah baik BPBD dan DINSOS mendirikan dapur umum yang lokasinya berbeda mengingat genangan air yang cukup luas sehingga harus melakukan pendistribusian di tempat yang berbeda agar pendistribusian bantuan bencana berjalan dengan merata

### **3.2 Faktor Yang Mendukung**

Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Provinsi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Negara Bagian dan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan kebijakan tersebut, yang memberi mereka kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola anggaran mereka sendiri, mereka dapat menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan yang mengatur kepentingan masyarakat, termasuk pemberian bantuan dan dukungan kepada korban bencana. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berawal dari kebijakan tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan perekonomian daerah yang disalurkan melalui berbagai bentuk bantuan, salah satunya adalah bantuan bagi warga yang terkena bencana alam. Kebijakan ini memungkinkan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan kepada korban bencana. Dengan alokasi anggaran yang besar, semua korban bencana alam dan bencana lainnya di Kabupaten Gorontalo dapat tertolong sesuai dengan hasilnya

### **3.3 Faktor Yang Menghambat**

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan atau kendala dalam mengelola pasang surut ini adalah sumber daya yang terbatas. Berdasarkan hasil wawancara Marzan Rauf, terdapat beberapa kendala dan keterbatasan dalam mengatasi banjir, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia; Sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan keberhasilan operasi dengan menjalankan fungsi-fungsi yang ditentukan dalam penanggulangan bencana. Anggota Badan Perlindungan Sipil Daerah dan Dinas Sosial Gorontalo membutuhkan personel yang cukup kualitas dan kuantitas serta mendukung pelaksanaan langkah-langkah yang telah disiapkan, terutama dalam distribusi logistik. Salah satu ciri sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang dicapai. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang baik dan optimal dalam pelaksanaan upaya perlindungan sipil sesuai prosedur atau ketentuan. Mengenai jumlah pegawai, dapat memberikan pelaksanaan pekerjaan yang lebih luas, sehingga operasional terutama pada saat darurat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Keakuratan Data; Kendala selanjutnya dalam penanggulangan bencana, khususnya Penanggulangan Kesiapsiagaan Bencana Pemerintah Daerah Gorontalo adalah ketidakakuratan informasi atau informasi yang diperoleh dari lapangan atau tempat terjadinya bencana banjir. Informasi yang salah menyebabkan penanganan bencana banjir yang tidak terduga, karena biasanya informasi dari lokasi bencana banjir menjadi informasi utama yang harus segera ditindak oleh BPBD dan Dinas Sosial Gorontalo. Karena

ketidakakuratan informasi yang diterima, BNPB menyusun anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan ke depan.

3. Kurangnya Anggaran; Kendala terakhir yang banyak dialami OPD adalah belum optimalnya sumber daya yang diperoleh atau dimiliki, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Gorontalo yang juga memiliki keterbatasan sumber daya untuk situasi banjir. Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gorontalo. Kurangnya anggaran operasi dan staf yang siap dipanggil dalam perbantuan tugas tugas penanggulangan bencana saat bencana banjir terjadi dapat menghambat jalannya penanganan.

#### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian pertama oleh Hakim (2021) dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda dengan hasil penelitian bahwa Dinsos Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dan fungsi membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang sosial. Peran kesejahteraan sosial dalam penyaluran bantuan pendapatan bagi orban kebakaran masih dipandang lemah dan perlu perhatian khusus kepada anggota keluarga terdekat. Kelangsungan hidup dasar para korban bencana berupa makanan, pakaian, dll, yang dipastikan dengan penyaluran bantuan sosial. Se jauh ini, hasil yang dicapai telah berjalan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan agar dapat terealisasi dengan sempurna. Penelitian kedua oleh Peneliti kedua oleh Ischa dan Sarwono (2014) dengan judul Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam Studi Empiris pada Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro bahwa pelaksanaan mekanisme distribusi bantuan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan fungsi manajemen logistik, namun mekanisme distribusi juga dapat terhambat oleh kendala. Penelitian ketiga oleh Peneliti Paripurno dan Prasetya (2021) dengan judul Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir: Studi Kasus Tanggap Darurat Bencana Di Kota Kendari Tahun 2017 bahwa penanggulangan darurat bencana banjir di Kota Kendari tetap dilanjutkan, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan masyarakat karena terdapat permasalahan kurangnya sumber daya manusia dalam pembantuan pendistribusian.

#### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat Sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Bencana Bagi Korban Banjir di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yakni kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi, kurangnya keakuratan informasi dan data tempat terjadinya bencana banjir, dan kurangnya anggaran operasi dan staf yang siap dipanggil dalam pembantuan tugas.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan bahwa sinergitas BPBD dan DINSOS dalam penyaluran bantuan logistik tersebut secara implementatif sudah optimal, karena target yang dicapai sudah memenuhi dan ketepatan waktu yang dilakukan kedua pihak instansi tersebut sudah sangat tepat waktu.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian ini dilakukan agar menjadi bahan penelitian selanjutnya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BNPB dan Din so s Daerah Kabupaten Gorontalo besertajajarannya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, M. I. (2016). Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Pendamping Deaa dengan Pemerintah Deaa Kabupaten Nganjuk. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Vol. 4, Surabaya: Universitas Airlangga.

Hakim, M. L. (2021). “Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosialterhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2018”. Jurnal Administrasi Publik No. 1, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Ischa, S., & Sarwono, H. I. (2014). Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris pada bencana banjir diKabupaten Bojonegoro). Malang: Universitas Brawijaya.

Mughron, M. M., Hariani, D., & Djumiarti, T. (2015). “Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Becana Di Kota Semarang”. Journal of Public Policy and Management Review Vol. 5. Semarang: UniversitasDipenogoro.

Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Pendamping Deaa dengan Pemerintah Deaa Kabupaten Nganjuk. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156).